

PERIZINAN – PELAYANAN

2017

PERBUP NO. 17, BD. 2017. NO. 17 KAB. PEMALANG : 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, perlu diatur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 56 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan jenis-jenis pelayanan perizinan meliputi tanggungjawab dalam rangka penandatanganan perizinan oleh DPMPTSP. Perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 April 2017
 - pada saat Peraturan bupati ini berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penandatanganan perizinan oleh Kepala Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
 - Ketentuan mengenai tata cara dan alur perizinan diatur tersendiri didalam Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 18) dan Peraturan 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 13 Pasal.